

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Prinsip Ruang Kolektif dalam Pernaungan Nusantara

Dalam jurnal Bahtera Karawitan Nusantara dalam Lautan Nusantara, ruang arsitektur nusantara dimengerti sebagai ruang berkehidupan bersama (Pangarsa, 2008). Hal tersebut telah menunjukkan bahwa ruang arsitektur nusantara adalah arsitektur bagi fitrah manusia. Universalitas arsitektur pernaungan dalam Pangarsa (2008) memiliki kerangka-struktural dan kaitan-sistemik dengan lingkungannya, seperti bayi dalam perlindungan rahim batas teritori kokoh. Meski hanya bernaung, namun ia terkait dengan dunia luar lewat raga sang ibu. Dalam sebuah video wawancara bersama praktisi arsitek lokal Jogja Eko Prawoto, beliau mengungkapkan pendapat mengenai dialektis munculnya teori aksi-reaksi, lalu munculnya arsitektur *fashion* yang melupakan persoalan kebudayaan. Sehingga seharusnya pola pikir ideal perancangan ruang dengan lebih baik melihat realita lokal yang ada dengan cara evolutif-organik dari dalam bukan mencomot langsung dialektis pola pemikiran luar dan memasukkannya ke dalam. Kolektif merupakan hakikat atau fitrah dalam kehidupan manusia, dalam konteks harafiahnya manusia lahir sendiri, hidup bersama dan mati sendiri. Dalam konsep kehidupan berbangsa Bhinneka memiliki pengertian sebagai perbedaan yang tidak dapat ditentukan sebagai tiap individu semenjak ia diciptakan. Namun Ika atau manunggal merupakan tugas manusia secara hakikat bahkan semenjak dalam kandungan untuk menjalani kehidupan yaitu berkehidupan bersama.

Persoalan ini bukan hanya mengenai identitas, namun konteks lokalitas dan kehidupan, arsitektur yang bertumbuh-kembang dari dalam atau mencomot permodelan gagasan arsitektur dari luar dimasukkan ke dalam. Akibatnya banyak arsitek dalam negeri menjadi pemamah biak arsitektur global dan menanggalkan aspek kearifan lokalnya (Wismantara, 2012). Terdapat perbedaan yang jelas konsep arsitektur pernaungan menurut Pangarsa (2008) dengan konsep arsitektur di belahan sub-tropik empat musim usia seperempat tahun saja. Karena tiga perempat tahun yang lain, iklim dingin lebih banyak mendesak manusia penghuninya untuk masuk dalam ruang perlindungan. Ruang luar dalam ruang perlindungan ini sulit dimanfaatkan sebagai ruang

bersama yang bernuansa akrab. Terutama sejak revolusi industri tahun 1750 – 1850, keakraban ruang perlindungan dengan konsep kehidupan sosial akrab seperti di dalam gua-gua tradisi prasejarah yang terlindung hawa dingin sub-tropik berubah mekanistik mengandalkan teknologi industrial. Arsitektur mereka-pun tumbuh dengan sifat eksklusif sehingga terdapat kekuatan namun kelemahan pula. Kekuatan terletak pada visual yang mencolok, dindingnya sebagai kanvas atau batu tataan untuk langgam arsitektur yang disuka. Kelemahannya berbasis bidang vertikal masif yang mengkonsumsi ruang dan dampak persoalan lingkungan lainnya akibat limbah material.

Eksklusifitas dengan kolektifitas kehidupan bersama sangat bertentangan dan terdapat perbedaan antara arsitektur perlindungan dengan arsitektur pernaungan. Karena nyatanya, ketika kini kota-kota di Indonesia tidak berhasil mensetimbangkan kehidupan bersamanya, individu terkuatlah yang akhirnya menguasai politik ekonomi dan hegemoni kota secara spasio-visual (Pangarsa, 2008:3). Arsitektur pernaungan dan prinsip ruang kolektif sangat terkait karena keduanya tergantung pada sifat dan keadaan sistem di luar tapak, berpasangan fitrah-kodrati, dan ketika keadaan eksternal berubah maka kualitas pernaungannya ikut berubah pula. Ruang kolektif (KBBI, 2012) dapat dikatakan sebagai ruang yang digunakan secara bersama atau gabungan. Nusantara sebenarnya bertulang punggung ruang bersama (Pangarsa, 2012). Kuncinya pada notion ruang bersama, bukan dalam arti menguasai tetapi dalam arti pihak yang bertanggung-jawab.

Melihat perbedaan tersebut, maka upaya pembaharuan arsitektur nusantara yang sesuai dengan perubahan zaman dengan pada arsitektur pernaungan amat diperlukan. Terutama di era globalisasi dan masyarakat *open society* saat ini, dorongan untuk menelusuri kembali wawasan lokal sangat diperlukan demi tercapainya arsitektur bermuatan nilai hakikatnya. Setiadi (2010) menyebutkan bahwa dorongan untuk melakukan penelusuran nilai-nilai lokal dalam arsitektur saat ini semakin kuat. Hal ini didasari oleh berbagai reaksi terhadap prinsip universalitas, fungsionalitas, dan simplifikasi paham global yang kurang memberi tempat bagi keragaman identitas, lokalitas, dan kekhasan budaya dalam lingkungan masyarakat. Wismantara (2012) sejalan dengan Setiadi (2010) bahwa mengkaji kembali prinsip ruang kolektif dalam arsitektur pernaungan nusantara dapat menjadi pembaharuan Arsitektur Nusantara untuk mempersiapkan masa depan arsitektur tanah-air yang sesuai konteks lokalnya.

1.1.2. Fenomena Komunitas Seni dan Ruang Berkesenian di Malang

Jika mengacu pada data Spektrum Kependudukan Kelompok Umur yang tercantum dalam Dispendukcapil tahun 2013 Kota Malang, jumlah kelompok usia setara mahasiswa (19-25 tahun) dan kelompok usia remaja (11-16 tahun) menunjukkan angka terbanyak populasi penduduk Kota Malang (Berdasarkan penetapan Indonesia mengacu pada batasan remaja PBB yaitu usia 14-24 tahun). Jika dijumlah maka menunjukkan prosentase paling besar yaitu 28,4% dari total keseluruhan penduduk. Grafik jumlah penduduk berdasarkan sensus tiap tahunnya menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk tersebut juga terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 Kota Malang berpenduduk 819.509 jiwa bersumber dari Malang Dalam Angka 2011 dengan laju pertumbuhan 0,80 % tiap tahunnya, kini telah bertambah menjadi 822.857 jiwa mengacu dari data Dispendukcapil.

Fenomena secara umum yang tampak dalam konteks lokal saat ini, terdapat beberapa kelemahan dalam pengembangan komunitas kesenian; pertama adalah terlalu bergantungnya pengembangan kesenian tersebut terhadap pemerintah. Sebagai contoh kasus Dewan Kesenian Malang yang memiliki data tercatat kurang lebih 44 Organisasi Kesenian berdasarkan Data Dinas Pariwisata Kota Malang tahun 2008, ternyata belum mampu menarik minat kalangan pelajar usia mahasiswa yang mendominasi jumlah populasi Kota Malang kini. Sehingga dampaknya adalah pada keberlangsungan dan perkembangan komunitas tersebut yang semakin hari semakin terkesan terpinggirkan. Data mengenai acara pengadaan kegiatan kesenian oleh pelaku komunitas yang tercatat tadi sangat minim, karena pengadaannya bergantung pada Dewan, inklusif dan kurang membuka diri. Sehingga diperlukan kajian terhadap pelaku komunitas independen yang bergerak secara kolektif tanpa ketergantungan mutlak pada Dewan untuk dihadirkan ruangnya dalam konteks Arsitektur.

Jika fenomena tersebut dicermati sebagai sebuah potensi, jumlah komunitas seni, pelaku, penggiat maupun penikmat seni yang didominasi oleh kalangan remaja dan mahasiswa, pertumbuhan komunitas independen berbasis kolektif ternyata berkembang pesat di Kota Malang. Pemuda dengan karakter semangat independen yang atau nama lainnya indie, seni, sosial maupun aktivisme lingkungan berupaya terus berkontribusi aktif terhadap perkembangan Kota Malang. Kekinian tercermin dalam semangat pemuda karena pemuda yang terus bergerak dinamis terhadap zaman, tidak gagap teknologi, tidak gugup sosial dan terus memperbaharui diri. Independensi tercermin dalam semangat berkarya, upaya kreatif, dan belajar secara kolektif

dalam wadah komunitas. Sebuah hal positif sebagai solusi mempersiapkan budaya di era globalisasi dan MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean di akhir 2015, karena jika mengacu pada sejarah bangsa Indonesia sendiri, pada krisis moneter tahun 1998, hanya Usaha Kecil Menengah yang didominasi rakyat kecil dan pemuda yang mampu bertahan dari krisis ekonomi dengan menciptakan pasarnya sendiri. Pengembangan sebuah ruang bagi komunitas akan berdampak positif salah satunya dapat memacu kreasi penciptaan dialogis ketika berbagai macam ide, pembelajaran, maupun gagasan berkesenian muncul pada ruang dan waktu yang bersamaan dan mampu menyelesaikan permasalahan.

Sebuah komunitas dalam kontribusinya secara kolektif disebutkan dalam jurnal yang ditulis Saputro (2013) bahwa fenomena komunitas indie berkembang pesat di perkotaan hampir diseluruh Indonesia, termasuk Kota Malang. Contohnya yaitu perkembangan komunitas film indie. Telah banyak komunitas yang bergerak di bidang perfilman indie Kota Malang, malah disetiap kampus dan sebagian SMA hingga SMK Kota Malang kini terdapat komunitas film sendiri. Tercatat berjumlah 37 komunitas film di Malang, seperti Societo, AV Club, Segienam, Karpet Merah, dan lain sebagainya. Produksi film tiap komunitas ini juga cukup masif, pertahunnya tiap komunitas mampu memproduksi 5 film. Jika ditotal jumlah dari penikmat film indie menurut banyaknya anggota kelompok di tiap komunitas, maka dengan anggota tiap komunitas yang rata-rata berjumlah 30orang, maka ± 900 orang adalah penikmat film indie Kota Malang. Tetapi persoalannya, wadah bagi penggiatnya di kota ini belum terakomodasi secara baik. Belum adanya fasilitas umum yang utuh menaungi kegiatan penikmat film tersebut, baik sekedar menonton maupun pada pelaksanaan kegiatan acara terkait dengan film indie, saat ini lokasi yang sering digunakan acara festival film indie yang dilaksanakan setahun sekali yaitu di *basement* DOME UMM yang sebenarnya difungsikan bukan sebagai lokasi pemutaran film indie. Dominasi pemuda dan pelaku kesenian independen, tercatat total lebih dari 700.000 jiwa di tahun 2011, 70% -nya adalah warga pendatang. Jumlah 20.000 jiwa dengan 75% adalah remaja yang berusia 18 – 24 tahun (Berdasarkan penetapan Indonesia mengacu pada batasan remaja PBB yaitu usia 14-24 tahun). Demografi dominasi usia remaja di Kota Malang ini menunjukkan peluang adanya solusi terhadap ruang bagi komunitas seni dapat tercapai. Caranya dengan memfokuskan pengamatan pada ruang berkegiatan para pelaku dalam komunitas seni yang independen berarti mampu menghidupi komunitasnya, terbentuk secara kolektif, mampu

menanggapi persoalan melalui karya seni, serta melibatkan proses kolaboratif dengan kelompok atau komunitas lain dalam setiap kegiatannya yang meliputi pertunjukan, inkubasi, dan ekshibisi.

Mengacu pada data sumber Dinas Pariwisata Malang dari 44 organisasi seni, jumlah anggota yang tercatat kurang lebih 660 pelaku kesenian. Namun fenomena yang terjadi angka tersebut sangat tidak sebanding dengan rata-rata jumlah pengunjungnya. Dewan Kesenian Malang misalnya, tercatat pada tahun 2009 berdasarkan data pengunjung, hanya 30 orang saja yang datang. Rizka (2009) mengungkapkan pengunjung sanggar tersebut umumnya anak kecil dan orang tuanya yang mendampingi putrinya berlatih. Dua faktor penyebab menurunnya jumlah pengunjung terkait apresiasi seni yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang mengacu pada tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat menurut Sobandi (2008), agaknya malah semakin mengkerdulkan konteks rakyat sendiri. Namun berdasarkan fenomena yang terjadi, Rizka (2009) lebih mengutamakan faktor eksternal yaitu kurangnya ketersediaan fasilitas untuk pelaku kesenian. Pemanfaatan fasilitas kegiatan seni serta kondisi lingkungan pembinaan maupun penyelenggaraan ekshibisi kesenian sangat jarang dilakukan.

Kota Malang memiliki 2 gedung kesenian yaitu Dewan Kesenian Malang dan Gedung Kesenian Gajayana. Mengacu pada peraturan Wali Kota Malang Nomor 47 Tahun 2012 Bab II, Pasal 3, Ayat 6, Gedung DKM dan Gedung Kesenian Gajayana berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Fasilitas gedung DKM terdiri dari 1 pendapa, 2 ruang pameran indoor, kantor sekretariat dan perpustakaan, 1 kamar mandi, serta ruang kamar bagi pengurus kebersihan. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim Radar Malang pada tanggal 10 Februari 2015, biaya perawatan gedung yang semakin naik dari per bulan Rp 250 ribu menjadi Rp 700 ribu saja tidak mendapat dukungan memadai dari pemerintah dalam hal ini pihak Dinas. Selain gedung DKM yang kurang representatif, karena sarana-prasarana kurang memadai, Gedung Kesenian Gajayana dengan kapasitas maksimum 500 orang juga kurang dalam hal mewadahi komunitas pelaku kesenian. Tercatat dari Disbudpar, event kegiatan yang masih jarang, tercatat hanya 10 – 15 kali kegiatan dalam satu bulan. Namun pada kenyataannya, menurut pendapat warga yang tinggal di sekitar gedung, sangat jarang diadakan kegiatan di tiap minggunya, malah gedung ini lebih banyak digunakan sebagai acara nikahan. Salah satu perwakilan seniman DKM, Jhoni mengungkapkan bahwa kekurangan yang serba apa adanya pada gedung DKM ini menyebabkan seniman-seniman sering menuju kampus sebagai *venue* kegiatan. Fasilitasnya juga standar, jika gedung yang bagus dengan kapasitas besar seperti Graha

Cakrawala, seniman kurang bisa menjangkau dalam hal biaya sewa yang relatif mahal. Taman Krida Budaya sebagai milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurut Jhoni belum terakses akibat waktu operasi, anggaran sewa, dan regulasi. Beberapa pakar dan pemerhati kesenian Kota Malang yaitu Prof. Dr. Djoko Saryono., MPD mengungkapkan bahwa Kota Malang membutuhkan ruang kesenian yang model penataan komponennya fleksibel, sehingga memungkinkan diadakannya pertunjukan lain dilengkapi kelengkapan yang menunjang. Sama halnya menurut Wakil Dekan III Fakultas Sastra UM Dr. Kholisin M.Hum mengutarakan perlunya ruang kesenian menggandeng mahasiswa karena ide seni yang layak untuk ditampilkan agar ruang kesenian sendiri memiliki gaung yang terdengar.

1.1.3. Kolektifitas dalam Historis Kota hingga permasalahan Generasi Millenial

Sejak era kerajaan hingga kependudukan penjajahan Jepang dan kolonialisme Belanda, Kota Malang tidak pernah lepas dari fenomena perebutan ruang. Penduduk pribumi dan penjajah saling klaim terhadap ruangnya, sebuah catatan sejarah pernah menyebutkan pada tanggal 23 Juli 1947, warga Kota Malang pernah berhasil mengambil hak ruangnya dari kedudukan kolonial. Peristiwa yang sering disebut sebagai Malang Bumi Hangus, menjadi tanda awal kebangkitan warga Kota Malang. Ketika warga Malang serentak mendengar bahwa Belanda akan tiba, di jalan raya dalam sekejap menjadi lautan manusia karena semakin riuhnya keinginan warga Malang untuk mengungsikan diri. Ketika itu ledakan dinamit yang sengaja dipasang saling meledak beriringan hampir di seluruh lokasi Jalan Kayutangan. Penduduk mengungsi ke daerah perbatasan karena asap mengepul hingga jarak pandang relatif pendek. Tercatat lebih dari 1000 gedung di Kota Malang hancur karena sengaja dibakar bukan karena serangan musuh. Meskipun pada tanggal 31 Juli 1947 Belanda berhasil masuk ke Kota Malang, namun tidak dapat menggunakan gedung-gedung aset lokal, dan dipaksa bertempur melawan taktik gerilya tentara republik. Hingga akhirnya Perjanjian Renville 6 Februari 1948 memberi dampak agar secara resmi pasukan Belanda menarik mundur dari wilayah Malang secara jalur diplomatis. Semenjak inilah penanda peristiwa perebutan ruang dan semangat kolektif warga Malang tumbuh.

Jika meninjau sejarah, maka negosiasi menjadi kunci penting dalam sebuah perebutan yang terkait dengan ruang dan semangat kolektifitas berbagai pihak dengan tujuan yang sama yaitu mengusir penjajahan kolonial. Kini, bagaimana persoalan tentang ruang dan komunitas kolektif? Melanjutkan pembahasan pada Bab 1.1.2, maka perlu diperhatikan persoalan

pengadaan ruang komunitas seni yang lebih spesifik dengan tujuan yang sama pula untuk menghadirkan semangat kolektifitas. Peristiwa menarik pernah terjadi terkait penggunaan ruang luar dan ruang dalam Taman Krida Budaya sebagai wadah dan ruang untuk seniman yang paradoksal. Pada tanggal 22-24 April 2014, event Apresiasi Seni Tradisi yang diikuti oleh 30 Sekolah Dasar, 39 jenjang SMP, dan 34 jenjang SMA dari 38 Kabupaten/Kota yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menggelar *event* besar skala provinsi dengan menggunakan fasilitas Taman Krida Budaya sepenuhnya. Melalui pengamatan langsung tanggal 23 April 2014 pukul 18.00 hingga 20.30 WIB. Tercatat 4 sektor pemanfaatan ruang yaitu ruang pada *Pendapa*, ruang parkir luar, ruang parkir dalam, dan ruang timur sebagai lokasi peserta. Namun pengunjung usia remaja dan mahasiswa amat jarang ditemui, dominasi siswa peserta, orang-tua dan guru pendamping saja. Padahal, Kota Malang berdasarkan data statistik menunjukkan dominasi usia remaja yaitu mahasiswa (lihat Tabel 1.1). Dari 3 sektor penggunaan ruangfungsinya dibagi menjadi yaitu; depan terdapat 17-20 stan, selatan (samping) untuk parkir kendaraan, sektor utara parkir, hingga sektor luar juga menjadi lahan parkir ditengah median jalan raya Soekarno-Hatta yang cukup menyebabkan kemacetan.



Gambar 1.1 Acara Apresiasi Seni Tradisi 2014
Sumber:Dokumentasi Pribadi

Dominasi ruang yang meluber di tengah jalan ini amat paradoksal dengan kegiatan pemanfaatan median jalan tersebut sebagai acara bagi komunitas musik di Kota Malang. Setting panggung di tengah jalan menjadi salah satu bentuk ekstrim penanda keinginan merebut ruang bagi pelaku kesenian. Contoh Fenomena ini terjadi pada *event* tahunan selama bulan puasa yaitu Rengeng-Rengeng Ramadhan yang bersamaan dengan acara solidaritas kolektif berjudul

#mlg4palestine tanggal 17 Juli 2014. Pemanfaatan ruangnya malah menggunakan median jalan dan sebarang jalan Taman Krida Budaya. Pertanyaannya; Mengapa tidak menggunakan Taman Krida Budaya? Mengapa malah menggunakan ruang di seberang dan median jalan yang tadinya digunakan untuk parkir lebih pada event tingkat provinsi? Apakah tidak tersedia ruang publik bagi seniman lokal Kota Malang? Bagaimana sebenarnya ruang representasi yang sesuai bagi karakter aktivitas pelaku seni di Kota Malang?



Gambar 1.2 Acara #MLG4Palestine 2014
Sumber:Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.3 Rengeng Rengeng Ramadhan 2014
Sumber:Dokumentasi Pribadi

Seperti telah tercatat pada pembahasan sebelumnya kegiatan kesenian di Kota Malang secara demografi didominasi 75% usia remaja yang berusia 18 – 24 tahun. Maka permasalahan karakter perilaku usia inilah yang menentukan fokus pembahasan untuk lebih memahami konteksnya. Berdasarkan teori mengenai 5 generasi rentang waktu tahun kelahiran, dibagi menjadi: *The Greatest Generation* (lahir sebelum 1928, di tahun 2015 berusia 88-100 tahun), *The Silent Generation* (lahir 1928-1945, di tahun 2015 berusia 70-87 tahun), *The Baby Boom Generation* (lahir 1946-1964, di tahun 2015 berusia 51-69 tahun), *Generation X* (lahir 1965-

1980, tahun 2015 berusia 35-50 tahun), dan terakhir *The Millennial Generation* / Generasi Millennial (lahir 1981-1997, tahun 2015 berusia 18-34 tahun). Apakah Generasi Millennial ini kurang kolektif sehingga membutuhkan solusi arsitektur berprinsip ruang kolektif? Mari kita lihat dan tinjau karakteristiknya. Berdasarkan hasil 6 tahun penelitian Doktor Psikologi Muhammad Faisal (pendiri Youth Laboratory Indonesia), keunikan generasi yang lahir di era internet ini berperilaku adaptif, cepat tanggap dengan segala sesuatu bernuansa digital. Kebergantungan generasi muda Indonesia terhadap media sosial kini merupakan salah satu yang terkuat di dunia. *Overload* informasi mengenai berbagai krisis global, alam dan kemanusiaan menyentuh ranah kognisi anak muda sehari-hari. Implikasinya berdampak pada peningkatan *sharing* dalam sebuah *peer-group* dengan dorongan untuk mengatasi *anxiety* maupun perasaan cemas. Sehingga lumbung-lumbung sosial lansekap sosiologis berupa coping dalam *peer-group* inilah yang menghadirkan sebuah komunitas. Tumbuhnya tren ini juga diyakini sebagai gerakan anti-globalisasi dari generasi milenial Indonesia. Namun persoalannya konstruksi identitas yang tumbuh menurut M. Faisal disini adalah identitas pribadi (*inner-self*) bukan identitas sosial (*outer-self*). Bahkan di kota besar seperti Jakarta, pemudanya tidak bisa lagi mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas suku atau identitas sosial apapun. Dengan padatnya arus informasi mengenai *update* diri yang dikonsumsi generasi muda ini, proses transaksi informasinya tidak lagi berbasis semangat berbagi / *sharing*, namun telah berevolusi menjadi semangat kompetisi yang menunjukkan eksistensi dan signifikansi jati diri kepada orang lain. Dikutip pula dari *livescience.com*, generasi ini akhirnya berkesan individual, mengabaikan membantu sesama, dan terfokus pada nilai material. Sisi negatif lainnya adalah hilangnya batasan etis dalam upaya kompetitif di media sosial, tujuannya untuk mendapatkan reward sosial berupa 'like' atau 'retweet' yang terbanyak. Keseluruhan dampak ini sangat menjauhkan generasi millennial dari fitrah pada pembahasan bab 1.1.1 sehingga diperlukan setting *offline* atau ruang interaksi tatap ruang langsung di kehidupan nyata bukan ruang digital, untuk merekonstruksi *outer-self* / identitas sosial berfitrah kolektif yang bertujuan kebaikan bersama bukan kebaikan privat / individu.

1.1.4. Belajar dari Komunitas Musik di Galeri Malang Bernyanyi

Studi kasus fenomena diatas akhirnya memerlukan perhatian bagi dunia keilmuan terutama arsitektur dalam pengadaan ruang. Peran sertanya amat diperlukan sebagai solusi

permasalahan pelaku kesenian. Oleh sebab itu, penulis berusaha memfokuskan analisis kajian pada pelaku komunitas seni musik yang membutuhkan ruang pengadaan mendesak bagi kegiatan berkeseniannya. Galeri Malang Bernyanyi (GMB) yang berlokasi di Perum Griya Shanta Blok G-407 adalah sebuah organisasi sosial yang didirikan oleh gabungan beberapa komunitas, sehingga status kepemilikannya adalah milik komunitas. Sebuah pembelajaran timbal-balik bagi perancang (posisi arsitek) untuk menggali lebih dalam mengenai kolektifitas dan komunitas musik tersebut untuk menghadirkan ruang yang lebih kontekstual bagi karakter pelakunya.

Permasalahan yang mendesak bagi pengadaan ruang diawali dari peristiwa berkembangnya galeri ini sebagai pengingat barometer musik di Indonesia era 1970-an hingga 1990-an lampau. Komunitas Pecinta Kajoetangan kemudian mempunyai inisiatif mendirikan Galeri Malang bernyanyi sebagai wadah pengumpulan peninggalan-peninggalan musik dari Malang. Pada 8 Agustus 2009, tempat yang disebut Galeri Malang Bernyanyi akhirnya didirikan, berisi kumpulan poster, piringan hitam, kaset bahkan foto-foto musik Indonesia. Lokasi awalnya di Jalan Citarum 17 Ciliwung, rumah milik Hengki Herwanto. Namun seiring waktu, semakin menambah pula koleksi awal galeri ini, sehingga harus berpindah pada tahun 2013 ke Perum Griya Shanta Blok G-407 dikarenakan lokasi yang tidak muat menampung koleksi. GMB sendiri secara *de facto* sudah menjalankan peran sebagai sebuah museum musik. Hal ini karena fokus utamanya adalah mengumpulkan koleksi rekaman, data tulis, poster, booklet musik Indonesia dengan visi memelihara sejarah perjalanan musik Indonesia. Untuk berpindah, Hengki Herwanto memakai sistem sewa per-3 tahun saja, dengan biaya kolektif bersama rekan-rekannya yang mencapai lebih dari Rp. 45 juta. Karena sistem sewa, maka tanggungan itu harus terpenuhi jika masanya telah habis.

Koleksi yang terpajang semakin bertambah melalui donasi dari komunitas pecinta musik di seluruh Indonesia bahkan Perancis, kini tercatat sekitar 15.000 koleksi telah tertampung. Tidak hanya rekaman musik dalam negeri namun bertambah dari luar negeri mulai musik klasik dan *country*. Terdapat pula *Gramophone* untuk memutar piringan hitam bagi pengunjung. Biaya yang ditarik untuk keluar masuk adalah gratis, karena bersifat independen, maka biaya pengelolaan ditanggung mandiri dan hanya menggantungkan dari beberapa donatur. Sangat mendesak karena kondisinya diharuskan untuk segera mencari ruang baru seiring bertambahnya koleksi untuk memajukan keberadaan GMB.

Peluang arsitektur sebagai solusi terhadap permasalahan ruang komunitas kesenian di Malang terutama komunitas di Galeri Malang Bernyanyi dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip ruang kolektif sebagai pernaungan yang sesuai terhadap aktivitas komunitas seni musik tersebut. Disini peran serta penulis sebagai penggagas perancangan berusaha meninjau salah satu komunitas musik di Kota Malang dengan pengamatan langsung hingga mendapat kriteria desain yang sesuai bagi karakter pelakunya. Oleh karena itu penulis mengangkat judul Penerapan Prinsip Ruang Kolektif pada Pusat Komunitas Musik (Studi pada Galeri Malang Bernyanyi) agar nantinya bertujuan untuk:

- a. Sebagai wadah komunitas seni musik yang semakin berkembang dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan komunitas itu sendiri.
- b. Upaya perbaikan pada ruang komunitas seni musik dengan prinsip ruang kolektif yang menjadi representasi ruang pelakunya.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Ruang kesenian di Kota Malang kurang dalam hal sarana-prasarana, tidak terakses, kurang fleksibel, tidak digunakan sesuai fungsinya dan tidak mampu mewadahi komunitas seni yang terus berkembang pesat, sehingga minim pengunjung
2. Ruang kesenian dengan fasilitas standar dan kapasitas besar cenderung eksklusif, komersil dan privat
3. Belum adanya pusat komunitas seni musik yang merepresentasikan ruang komunitas seni dan aktivitas kolektifnya, kontekstual terutama sebagai solusi bagi permasalahan pada bab 1.1.3

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang ruang komunitas Galeri Malang Bernyanyi yang menjadi representasi ruang kolektif pelaku, dan paradigma kontekstual sesuai karakter penggunaan ruang.

1.4. Batasan Masalah

1. Ruang Komunitas Seni Musik dengan prinsip kolektif ini dapat berfungsi sebagai ruang ekshibisi, inkubasi, dan pertunjukan
2. Komunitas seni musik yang menjadi kajian fokus adalah komunitas di Galeri Malang Bernyanyi

3. Sebagai lingkup kajian difokuskan pula melalui pengamatan pada penggunaan ruang kesenian musik di Malang yang terbentuk secara kolektif bukan sebagai ruang *profit*, mampu menanggapi persoalan melalui karya seni, serta aktif melibatkan kegiatan secara kolaboratif dengan pemuda maupun komunitas lain dalam setiap kegiatannya yang meliputi pertunjukan, inkubasi, dan ekshibisi.
4. Target sasaran Ruang Komunitas Seni Musik adalah komunitas spesifik kesenian musik sesuai pembahasan pada Bab 1.1.3 dan masyarakat Kota Malang pada umumnya.

1.5. Tujuan

Merancang Ruang Komunitas Musik GMB yang mampu menjadi representasi ruang kolektif pelaku, dan paradigma kontekstual sesuai karakter penggunaan ruang.

1.6. Manfaat

A. Bagi Keilmuan

1. Dapat membuka luas pandang keilmuan arsitektur
2. Dapat menjadi rujukan dalam proses pemahaman, metode, dan desain arsitektur nusantara kontemporer sebagai sumbangan keilmuan arsitektur
3. Dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi sebagai paradigma yang dapat berkembang dan tidak berhenti menyesuaikan konteks ruang dan waktu

B. Bagi Keprofesionalan

1. Dapat menjadi referensi bahan kajian dalam perancangan desain ruang komunitas seni musik
2. Dapat menjadi masukan sebagai daya upaya mengembalikan nilai-nilai arsitektur lokal melalui kajian ruang kolektif
3. Dapat menerapkan muatan nilai kolektif dalam perancangan fasilitas sesuai karakter yang kontekstual

1.7. Kerangka Pemikiran

